



► Risalah Sektoral ILO

Tanggal: 17 April 2020

COVID-19 dan dampaknya pada pertanian dan ketahanan pangan

Ketika wabah COVID-19 terus menyebar di seluruh dunia, maka penting untuk menanggapi dampak yang ada dan yang mungkin terjadi pada sektor pertanian, baik dari perspektif penawaran dan permintaan pangan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa rantai pasokan pangan global dan nasional terus berfungsi dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan, mencegah terjadinya krisis pangan pada negara-negara yang sudah mengalami tantangan ketahanan pangan dan nutrisi dan mengurangi dampak negatif pandemi secara keseluruhan terhadap perekonomian global.

Kendati proporsi lapangan kerja di sektor pertanian dari total lapangan kerja menurun dari 40,2 persen menjadi 26,8 persen selama dua dasawarsa terakhir, pertanian menyediakan mata pencarian bagi lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia dan tetap merupakan tulang punggung dari banyak negara dengan penghasilan rendah terhitung 60,4 persen dari total lapangan kerja¹ dan berkontribusi pada duapertiga produk domestik bruto di beberapa negara tersebut. Sektor ini khususnya penting di Afrika dan Asia, ketika proporsi lapangan kerja pada sektor pertanian terhadap total masing-masing sebesar 49 dan 30,5 persen. Sektor pertanian merupakan sumber utama kesempatan kerja bagi perempuan, mencakup sebesar 41,9 persen dari seluruh angkatan kerja pertanian di negara berkembang.²

Kendati terdapat penurunan proporsi lapangan kerja di sektor pertanian terhadap lapangan kerja global, keluaran pertanian terus bertumbuh.³ Disertai dengan urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita dan peluang ekspor, transformasi sistem pangan membawa pekerjaan-pekerjaan baru dalam sektor agri-pangan yang lebih besar, yang mencakup sektor pertanian dan sektor non-pertanian terkait, seperti pengolahan, manufaktur, pemasaran pangan, transportasi dan persiapan pangan. Sektor agri-pangan memperkerjakan mayoritas dari pekerjaan usaha mandiri dan pekerjaan diupah di negara-negara berkembang. Meskipun demikian, saat ini, banyak pekerjaan ini ditandai dengan defisit pekerjaan yang layak yang berakibat pada antara lain: Kelembagaan bursa kerja yang lemah, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan; lingkungan yang tidak memadai untuk perkembangan usaha, produktivitas rendah; perubahan iklim; maraknya informalitas; infrastruktur yang buruk; dan terbatasnya akses terhadap perlindungan sosial dan layanan lainnya, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Tantangan lainnya muncul dari semakin meningkatnya paparan terhadap berbagai bahaya keselamatan, kesehatan, lingkungan dan biologis pada para pekerja pertanian, termasuk bahaya yang terkait dengan bahan kimia, bunyi, cedera muskuloskeletal, panas dan sebagainya.

1 ILOSTAT, Lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas ekonomi – perkiraan menggunakan model dari ILO, November 2019.

2 ILO, World Employment Social Outlook: Trends for women 2017, 2017.

3 IFAD, Rural development report 2016: Fostering inclusive rural transformation, 2016

Pekerja pertanian mengalami tingkat kemiskinan yang paling tinggi meski memiliki pekerjaan (*working poverty*). Seperempat dari pekerja yang bekerja di sektor ini mengalami kemiskinan ekstrem. Meskipun mereka memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional, menjadi penyambung dalam struktur global produksi dan perdagangan pertanian, serta menyediakan pangan bagi dunia, banyak pekerja pertanian dan keluarganya yang mengalami kemiskinan dan persoalan ketahanan pangan.

Kendati pekerjaan sektor agri-pangan telah ditetapkan sebagai komponen penting dalam konteks krisis COVID-19 di banyak negara, langkah-langkah yang diadopsi untuk memperlambat pandemi dapat menekan

kapasitas sektor ini untuk terus memenuhi permintaan, menyediakan penghasilan dan mata pencarian dan memastikan keselamatan dan kesehatan bagi jutaan pekerja serta produsen pertanian. Tindakan-tindakan mendesak guna menanggapi berbagai tantangan kerja yang layak yang dihadapi oleh para pekerja pertanian dan guna meningkatnya jalannya sektor agri-pangan akan menjadi sangat penting dalam menangani krisis secara efektif, baik saat ini dan masa mendatang. Pelajaran perlu dipetik dari respons-respons terhadap pandemi dalam pertanian dengan cara pandang untuk “membangun kembali dengan lebih baik.”

Peluang yang muncul untuk mengadopsi inovasi teknologi dan meningkatkan kelestarian lingkungan tidak boleh terlewatkan.

► 1. Dampak dari COVID-19

Sejak awal pandemi, sejauh ini belum ada gangguan signifikan terhadap pasokan pangan yang dialami. Namun, kendala-kendala logistik dalam rantai pasokan, khususnya lintas batas dan pembatasan pergerakan dalam negeri, serta persoalan ketenagakerjaan, dapat mengakibatkan gangguan dalam pasokan pangan, apabila kendala ini terjadi dalam jangka panjang. Komoditas bernilai tinggi, dan khususnya yang mudah rusak, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar, daging, ikan, susu dan bunga, terutama akan terkena dampaknya. Krisis kesehatan telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam sub-subsektor seperti budidaya bunga di sejumlah negara.⁴ Mungkin juga akan terjadi beberapa penurunan kualitas pekerjaan dalam sektor ini dan hilangnya pekerjaan, khususnya pada dasar rantai pasokan. Perempuan dan kaum muda kemungkinan besar akan mengalami dampak yang lebih kuat, karena mereka khususnya rentan secara sosio-ekonomi.

Pembatasan pergerakan juga mencegah para petani dalam mengakses pasar dan berakibat pada terbuangnya pangan. Di banyak negara, para petani sekarang tidak mampu menjual produk mereka di pasar-pasar lokal atau ke sekolah, restoran, bar, hotel dan tempat-tempat rekreasi lainnya, yang mungkin ditutup untuk sementara.

Pandemi ini juga dapat memiliki dampak yang serius pada produksi dan pengolahan tanaman pangan yang bersifat padat karya akibat kurangnya tenaga kerja dan penghentian produksi sementara. Contohnya, sektor pertanian Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja cukup dramatis akibat ditutupnya perbatasan yang menyebabkan ratusan ribu pekerja musiman tidak dapat pergi ke lahan pertanian yang bergantung pada tenaga mereka selama musim panen. Dampak pada



Petani perempuan di lahan pertanian di Da Nang, Vietnam

sektor ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sejumlah produsen pertanian Eropa utama, termasuk Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Polandia, khususnya rentan akibat hal ini. Menurut Coldiretti, organisasi Italia yang mewakili petani, lebih dari seperempat makanan yang diproduksi dalam negara bergantung pada sekitar 370,000 pekerja migran musiman. Sekitar 100,000 pekerja tani tidak dapat datang ke Italia tahun ini, dan angka tersebut mungkin [dua kali lipat](#) di Perancis. Di Jerman, di mana terdapat sekitar 286,000 pekerja migran musiman yang terlibat tiap tahunnya dalam produksi buah-buahan, sayuran dan anggur, Pemerintah sedang menjajaki [berbagai cara yang berbeda](#) guna memobilisasi pekerja yang memadai untuk musim panen, termasuk dengan menjalankan penerbangan langsung bagi para pekerja tani dan mengeluarkan izin kerja sementara bagi para pencari suaka. Pada tanggal 2 April 2020, Komisi Eropa menerbitkan [pedoman praktis](#) bagi para negara anggota untuk memfasilitasi perjalanan lintas

⁴ Reuters, “No bed of roses: East Africa’s female flower workers lose jobs as coronavirus hits exports”, 11 April 2020; Martinplaut, “Tens of thousands of African jobs at risk as Europe dumps flowers during the Coronavirus crisis”, 22 March 2020

batas bagi para pekerja musiman dalam pekerjaan-pekerjaan penting, termasuk pekerja sektor pangan, seraya menempatkan semua langkah-langkah penting guna mencegah penyebaran pandemi lebih lanjut.

Pandemi ini juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap mata pencarian dari jutaan pekerja perkebunan yang terlibat dalam produksi pertanian yang berorientasi pada ekspor dan padat karya di negara-negara berkembang. Contohnya, penghentian sementara baru-baru ini di salah satu [lelang teh terbesar di dunia di Mombasa](#), Kenya, di mana teh-teh dari banyak negara Afrika timur diperdagangkan, apabila penghentian tersebut diperpanjang, akan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian lokal, nasional dan regional. Dampak langsung yang akan dirasakan di berbagai simpul-simpul dalam rantai pasokan, termasuk pabrik, gudang dan pengangkutan serta pertanian, yang mungkin terpaksa menghentikan produksi dan memberhentikan para pemetik, yang seringkali merupakan bagian dari kelompok pekerja yang paling dirugikan dan sangat rentan pada pembalikan ekonomi. Di Kenya sendiri, teh menyediakan mata pencarian bagi sekitar 600,000 pekerja skala kecil dan pekerja diupah; sementara di Malawi, sektor ini adalah sektor lapangan kerja formal terbesar kedua setelah pemerintah menyediakan pekerjaan bagi sekitar 52,000 pekerja.

Pembelian berlebihan akibat rasa panik dan penimbunan makanan oleh konsumen serta respons kebijakan terkait perdagangan terhadap pandemi, khususnya pembatasan apapun pada ekspor, dapat menyebabkan naiknya harga dan meningkatkan volatilitas harga dan membuat pasar internasional menjadi tidak stabil.⁵ Krisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah semacam itu khususnya merugikan negara-negara berpenghasilan rendah dan kekurangan pangan. Krisis pangan 2007-08 memperdalam kemiskinan di antara mereka yang memang sudah miskin⁶ dan mendorong sekitar 130 hingga 155 juta orang terjatuh ke dalam kemiskinan.⁷

Pekerja lepasan diupah, khususnya di pertanian, petani yang tidak memiliki lahan, pedagang skala kecil dan produsen komoditas yang nilai tukarnya menurun terhadap biji-bijian pangan (*food grains*) merupakan yang terkena dampak terbesar.⁸ Menurut perkiraan ILO, untuk mempertahankan standar hidup dan tidak

jatuh ke dalam kemiskinan, pekerja berupah rendah di negara-negara yang paling terkena dampaknya harus menemukan pekerjaan tambahan seminggu lebih panjang tiap bulannya.⁹ Banyak dari negara-negara ini yang juga mengamati terjadinya peningkatan signifikan dari putus sekolah dan jumlah pekerja anak, akibat tidak terjangkaunya biaya sekolah dan kurangnya pangan yang memadai.

Urgensi krisis ini dan kebutuhan untuk mengambil langkah dengan segera tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk melepaskan kerangka normatif bagi solusi kebijakan. Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dan [standar ketenagakerjaan internasional](#) menyediakan basis yang kuat untuk solusi di tingkat nasional.

Pemantauan dekat terhadap harga makanan dan pasar serta penyebaran informasi yang transparan akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memastikan manajemen pasar pangan yang efektif, mencegah pembelian berlebihan karena rasa panik dan memandu usaha-usaha pertanian dalam membuat keputusan produksi yang rasional.¹⁰ Dalam konteks ini, penting untuk memastikan aliran perdagangan internasional yang bebas, sementara menjamin kualitas pekerjaan dalam sistem pangan.¹¹

Agenda Pekerjaan yang Layak ILO semakin dikenal sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan¹² dan menyediakan basis untuk sebuah kerangka pembangunan global yang adil dan stabil serta respons terhadap krisis yang efektif.¹³ Dalam menangani dampak dari krisis kesehatan saat ini pada sektor agri-pangan, respons kebijakan nasional dan internasional harus didasarkan pada kerangka kerja ILO untuk menanggapi pandemi COVID-19, yang terdiri dari empat pilar yang saling terkait:

- ▶ Menstimulasi perekonomian dan lapangan kerja;
- ▶ Mendukung usaha, pekerjaan dan penghasilan;
- ▶ Melindungi pekerja di tempat kerja; dan
- ▶ Mengandalkan dialog sosial untuk mendapatkan solusi.

5 International Food Policy Institute, "COVID-19: Trade restrictions are worst possible response to safeguard food security", 27 March 2020.

6 Compton, J., Wiggins, S. & Keats, S., "Impact of the global food crisis on the poor: What is the evidence?", Overseas Development Institute, 2010.

7 World Bank estimates cited in United Nations Department of Economic and Social Affairs, "The global social crisis: Report on the world social situation 2011", 2011, p. 63.

8 Compton, J., Wiggins, S. & Keats, S., 2010 op. cit.

9 ILO "Investing in food security as a driver of better jobs", dalam World of Work Report 2011: Making markets work for jobs, 2011, p. 76; ILO, "Decent work for food security and resilient rural livelihoods", 2019.

10 FAO, "Agri-food markets and trade policy in the time of COVID-19", 2 April 2020; Agrilinks, "Preventing Global Food Security Crisis under COVID-19", 18 Maret 2020.

11 Joint Statement by the Directors-General of FAO, WHO and WTO, "Mitigating impacts of COVID-19 on food trade and markets", 31 Maret 2020.

12 G20, "G20 Food Security and Nutrition Framework", 2014; United Nations, "Zero Hunger Challenge", 2012; United Nations System High Level Task Force on the Global Food Security Crisis, "The Updated Comprehensive Framework for Action", September 2010.

13 ILO, "Decent work matters in crisis: ILO response to crisis challenges", Mei 2003; ILO, "The financial and economic crisis: A Decent Work response", March 2009.

Menstimulasi produksi pertanian dan memastikan jaminan penghasilan

Ketika situasi pandemi COVID-19, atau kekhawatiran akan penyebarannya, memiliki dampak negatif pada sektor pertanian, langkah-langkah darurat yang tepat harus diadopsi guna mendukung usaha-usaha agri-pangan dengan berorientasi pada upaya menstimulasi produksi pertanian dan memastikan bahwa pekerja terus menerima upah yang layak serta tunjangan lainnya, sesuai dengan kesepakatan kerja bersama yang ada dan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Dalam konteks ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada ratusan juta pekerja pertanian diupah yang memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan pasokan pangan dan kerap kali merupakan kelompok yang paling rentan, miskin dan mengalami kerawanan pangan.

Menyediakan akses ke tunjangan pengangguran dan bantuan sosial ke pekerja pertanian yang kehilangan pekerjaannya atau yang jam kerjanya dipotong juga penting untuk meringankan dampak dari krisis. Selain dari langkah-langkah segera ini, guna mengatasi krisis ini dan krisis apapun di masa mendatang dengan sukses, momentum ini harus digunakan untuk bergerak maju menuju sistem perlindungan sosial yang komprehensif, universal dan dibiayai secara kolektif.¹⁴

Menjamin jaminan sosial

Karakteristik produksi pertanian yang sifatnya musiman menambahkan tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial kepada para pekerja pertanian yang di banyak negara umumnya banyak dikecualikan dari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tenaga kerja nasional, seperti peraturan yang mengatur tentang upah minimum, jam kerja maksimum, cuti sakit berbayar dan jaminan sosial. Maraknya informalitas dan kurangnya infrastruktur dan layanan di daerah-daerah pedesaan lebih lanjut menghambat akses ke layanan perlindungan sosial yang ada.

Rekomendasi ILO 2012 mengenai Landasan untuk Perlindungan Sosial (No. 202), yang mempromosikan pendekatan universal dan progresif guna memperluas perlindungan sosial bagi semua, menanggapi semua kekhawatiran ini. Memastikan bahwa semua pekerja pertanian memiliki akses ke layanan kesehatan penting, termasuk pengujian, yang khususnya penting untuk menjamin keselamatan dan mencegah penyebaran virus.

Mekanisme perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan langsung tunai, akses ke pinjaman, produk-produk asuransi jiwa-kredit dan asuransi indeks cuaca, terutama dapat menjadi penting bagi usaha-usaha agri-pangan, khususnya apabila terdapat penurunan sementara dalam aktivitas ekonomi mereka, seperti yang terjadi sekarang. Pada masa-masa normal, mekanisme semacam ini dapat memainkan peranan penting dalam melindungi usaha-usaha pertanian dan masyarakat pedesaan dari kegagalan panen, dengan menyuntik uang ke perekonomian pedesaan yang haus akan uang tunai, dan menciptakan infrastruktur.

Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja

Perlu ada fokus khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja pertanian baik ketika memastikan ketersediaan jumlah pekerja pertanian musiman yang memadai di perekonomian maju, dan keberlanjutan produksi di negara-negara berkembang.

Semua pekerja dalam sektor agri-pangan, baik sementara, musiman ataupun migran, tidak peduli status hukumnya atau gendernya, memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Meskipun demikian, pada kenyataannya, mereka seringkali kekurangan akses untuk mendapatkan alat pelindung diri, fasilitas air dan sanitasi, sementara itu tempat produksi yang sangat ramai, yang umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang, meningkatkan risiko penularan.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko keselamatan dan kesehatan terkait COVID-19 dapat mencakup: Menyediakan akses ke alat pelindung diri yang memadai; mengatur ulang pekerjaan guna memastikan adanya jarak fisik yang aman antar pekerja, terutama dengan meninjau proses-proses yang umumnya memerlukan interaksi yang dekat; menerapkan langkah-langkah pengendalian lainnya, termasuk akses permanen ke pemeriksaan kesehatan dan fasilitas medis; memastikan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dengan sabun dan sanitasi tangan berbasis alkohol; melakukan pembersihan fasilitas tempat kerja dan peralatan kerja dengan disinfektan; dan meningkatkan frekuensi pembersihan. Juga penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke semua informasi yang relevan terkait dengan COVID-19, perlindungan pribadi dan kebersihan dalam bahasa setempat. Pengembangan dan penegakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang efektif mencakup semua peraturan K3 yang komprehensif untuk semua sektor, termasuk pertanian, dan penyediaan perlindungan untuk semua pekerja harus dilengkapi dengan budaya K3 yang bersifat preventif secara nasional dalam

14 ILO, "COVID-19: Social protection systems failing vulnerable groups", 25 Maret 2020

sektor tersebut, sesuai dengan Konvensi mengenai Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2001 (No. 184), dan Rekomendasi penyertanya No. 192. Langkah-langkah ini harus memungkinkan sektor pertanian untuk menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan dengan lancar di masa mendatang.

Memastikan kondisi pekerjaan yang layak

Pekerja pertanian kerap kali tinggal dekat dengan lokasi produksi dan satu sama lainnya. Ini dapat meningkatkan risiko paparan ke COVID-19. Apabila pekerja disediakan akomodasi, penting untuk memastikan bahwa akomodasi tersebut sesuai dengan standar-standar yang berlaku, yang mewajibkan adanya jarak yang memadai, per orang atau per keluarga, akses atas air minum yang aman dan fasilitas sanitasi serta bilas yang memadai.

Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan

Upaya-upaya harus diteruskan guna memastikan kepatuhan tempat kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan. Mungkin perlu untuk meninjau ulang metode kerja para pengawas tenaga kerja guna meningkatkan akses ke layanan-layanan yang mereka sediakan, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Di negara-negara yang sangat mengandalkan pekerja migran dalam sektor pertanian, perhatian khusus perlu diberikan guna memastikan rekrutmen yang adil dan diterapkannya langkah-langkah perlindungan dan pengaturan yang diperlukan, meliputi, contohnya, transportasi dengan kualitas dan kondisi kebersihan yang layak menuju tempat kerja. Dengan tidak berfungsinya sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan baik selama krisis, terdapat laporan bahwa [pekerja migran](#) menghadapi risiko eksploitasi yang semakin tinggi.

Mengandalkan dialog sosial untuk solusi

Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141) menegaskan pentingnya menghubungkan organisasi pekerja pedesaan dengan aksi-aksi pembangunan ekonomi dan sosial guna meningkatkan kondisi kerja dan hidup para pekerja pedesaan secara permanen dan efektif. Pekerja sektor pedesaan, oleh karenanya, harus terlibat penuh dalam penilaian dampak COVID-19 dan pemerintah harus memastikan bahwa konsultasi dan pelibatan organisasi pekerja pedesaan yang efektif dilakukan dalam proses penentuan respons yang tepat terhadap krisis. Untuk mencapai hal tersebut, dan sesuai dengan

Paragraf 11-13 dari Rekomendasi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 149), pemerintah harus mengambil langkah-langkah aktif guna memastikan bahwa organisasi pekerja pedesaan terwakili dalam dialog sosial di berbagai tingkat yang berbeda dan bahwa suara mereka didengar dalam berbagai hal yang muncul akibat krisis yang sedang terjadi dan membawa dampak pada masyarakat pedesaan dan pembangunan pedesaan.

► 2. Respons oleh konstituen dan mitra

Dalam sebuah surat terbuka, "[A call to action for world leaders preventing a global food security crisis while combating COVID-19](#)" ("Seruan bagi para pemimpin dunia untuk mencegah krisis ketahanan pangan global seraya melawan COVID-19"), para CEO dari perusahaan-perusahaan besar, organisasi masyarakat sipil, para peneliti dan politisi menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan penting dan terkoodinir guna mencegah pandemi COVID menjadi krisis pangan dan kemanusiaan global. Aksi yang diusulkan fokus pada: (1) Menjaga agar pasokan pangan mengalir ke seluruh dunia – mempertahankan perdagangan terbuka; (2) Memperluas dukungan bagi yang paling rentan; dan (3) Berinvestasi pada sistem pangan berkelanjutan yang tangguh – menabur benih pemulihan bagi masyarakat dan planet.

Pentingnya mempertahankan perdagangan terbuka juga ditekankan dalam sebuah [pernyataan bersama](#) oleh Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam [sebuah surat](#) ke kepala FAO dan WHO, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers'

Associations (IUF) – sebuah federasi serikat pekerja dengan anggota berasal dari beragam industri, termasuk pertanian dan pengolahan makanan – menyerukan aksi untuk melindungi nyawa, keselamatan dan mata pencarian pekerja pertanian yang menjadi sumber utama untuk ketahanan pangan. IUF juga menyusun serangkaian permintaan

dan pedoman mencakup [pertanian](#), [makanan dan minuman](#) dan [kesetaraan gender](#).

Sejumlah organisasi pekerja sektoral (seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/[GAPKI](#) dan Federasi Organisasi Pertanian Afrika Selatan/[Agri SA](#)) telah mengeluarkan pedoman bagi anggota mereka mengenai COVID-19. Pedoman yang sama juga dikeluarkan oleh sejumlah organisasi pekerja pertanian (seperti Farm Labor Organizing Committee/[FLOC](#)).

FAO telah menerbitkan serangkaian [risalah](#) mengenai dampak COVID-19 pada sistem pangan. Sebagai bagian dari Rencana Tanggap Kemanusiaan COVID-19 Global PBB, FAO telah meninjau program kemanusiaannya yang sedang berjalan untuk berfokus pada dukungan berkelanjutan bagi yang paling rentan dan menyusun tindakan untuk menanggapi efek samping dari virus tersebut. Upaya-upaya FAO berfokus pada: (1) Membangun sebuah fasilitas data global, berkolaborasi dengan Program Pangan Dunia (WFP) dan mitra lainnya; (2) Melakukan stabilisasi penghasilan dan akses terhadap pangan dan mempertahankan mata pencarian dan bantuan produksi pangan yang sedang berjalan; (3) Memastikan keberlangsungan rantai pasokan pangan kritis bagi populasi yang paling rentan; dan (4) mencegah penularan COVID 19 di antara para pekerja rantai pasokan pangan dengan meningkatkan kesadaran akan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan pangan, termasuk mengenai hak, peran dan tanggung jawab pekerja, bersama dengan otoritas nasional dan WHO.¹⁵

Di Kolombia, [sebuah kesepakatan](#) ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2020 antara serikat pekerja pedesaan SINTRAINAGRO dan asosiasi industri pisang Augura untuk menyediakan dukungan dan langkah-langkah perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi sekitar 22,000 pekerja perkebunan pisang. Ini mencakup, antara lain, penyediaan alat pelindung diri seperti masker dan disinfektan bagi semua pekerja, pembersihan dengan disinfektan dan penerapan jarak aman dalam transportasi, sesi istirahat makan rutin dan sebagainya. Semua pekerja di atas 65 tahun dan yang memiliki kondisi penyakit sebelumnya, termasuk kehamilan yang berisiko, tidak peduli jenis kontrak kerjanya, mendapatkan pengecualian kerja selama durasi berlakunya keputusan pemerintah mengenai langkah-langkah pengamanan terkait dengan COVID-19 dan akan menerima gaji pokok serta 8 persen tambahan.

Contoh-contoh langkah-langkah khusus yang diambil negara

Sebagian besar respons kebijakan nasional yang diambil berbentuk dukungan finansial bagi usaha pertanian dan langkah perlindungan sosial jangka pendek guna mendukung populasi kerja. Namun, hanya sedikit kebijakan yang diarahkan pada penerapan standar ketenagakerjaan dalam sektor atau promosi dialog sosial untuk pengembangan respons kebijakan. Ini adalah kesenjangan yang perlu diisi.

Di [Kanada](#), kapasitas peminjaman Farm Credit Canada telah dinaikkan sebesar 5 miliar dolar (CAD) dan 100 juta dolar Kanada (CAD) telah dialokasikan oleh organisasi lokal, regional dan nasional untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh pelosok negara. Di bawah Tunjangan Tanggap Darurat Kanada, pekerja yang tidak dapat bekerja karena alasan medis, dan memiliki manfaat cuti yang terbatas atau tidak membayar melalui pemberi kerjanya, dapat mengajukan aplikasi untuk memperoleh tunjangan kerja hingga selama 15 minggu, paling banyak 55 persen dari penghasilan mereka, atau sebesar 573 CAD per minggu.

Di [Tiongkok](#), Peoples Bank of China memperkenalkan perluasan peminjaman ulang dan fasilitas pemotongan ulang dengan bunga kecil sebesar 500 miliar yuan (RMB) guna mendukung UMKM. Bunga peminjaman ulang bagi wilayah pedesaan, pertanian, petani dan usaha-usaha kecil diturunkan menjadi 2,5 persen juga. Guna mendorong ketahanan pangan, Kementerian Pertanian dan Wilayah Pedesaan mengeluarkan beberapa catatan untuk mendukung kelanjutan dari operasi usaha-usaha pakan, penjalangan dan pengolahan daging serta rekomendasi bagi para manajemen tanaman pangan di lapangan dan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Beberapa kebijakan lokal memberikan manfaat pada angkatan kerja pertanian seperti subsidi tunjangan hidup sementara sebesar 300 RMB bagi pekerja pedesaan di Provinsi Hubei dan bantuan langsung tunai sebesar 3000 RMB untuk retensi populasi migran di Wuhan.¹⁶

Di [Mesir](#), moratorium undang-undang pajak atas lahan pertanian telah diperluas selama dua tahun. Kementerian Solidaritas Sosial juga merencanakan untuk memasukkan 100,000 keluarga tambahan ke dalam program bantuan sosial yang ada dan meningkatkan tunjangan sebesar 900 pound Mesir (EGP) untuk perempuan dan pemimpin-pemimpin di wilayah pedesaan. Pembayaran satu kali sebesar 500 EGP direncanakan bagi para pekerja informal terdaftar.¹⁷

15

16 CGTN, "PBOC increases re-lending, re-discount quota by 500 billion yuan to support small businesses", 27 Februari 2020; People's Daily Online, "Mitigating the impact of COVID-19 in the agricultural sector in China", 11 Maret 2020; World Bank, "Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A real time review of country measures (Version 3)", 3 April 2020.

17 Egypt Today, "Egypt takes economic measures related to pensions, agricultural taxes", 22 Maret 2020; Scoop Empire, "COVID-19 Updates: What is Egypt doing to curb the spread of the virus?", 2 April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

Di **El Salvador**, dana sebesar US\$ 80 juta akan dialokasikan melalui Dana Darurat guna mendukung sektor pertanian dan memastikan ketahanan pangan. Bantuan langsung tunai sebesar US\$ 300 juga telah diberikan kepada 1,5 juta rumah tangga yang bekerja di perekonomian informal yang belum memiliki jaring pengaman finansial.¹⁸

Di **Fiji**, sebuah paket respons pertanian mencakup paket dukungan pertanian baru guna mendukung produksi tanaman pangan jangka pendek melalui distribusi bahan baku dan benih. Anggaran Tanggap COVID-19 menyediakan bantuan pembayaran keringanan satu kali sebesar US\$ 150 bagi mereka yang bekerja di sektor informal.¹⁹

Di **Jerman**, Pemerintah telah memperpanjang "Peraturan 70 Hari" bagi para pekerja musiman, yang sekarang bekerja hingga 115 hari sampai akhir Oktober 2020 tanpa harus membayar kontribusi jaminan sosial. Pemerintah Jerman juga sudah meningkatkan batasan penghasilan tambahan untuk kompensasi kerja sementara dan untuk pensiun petani. Cuti sakit berbayar juga telah disesuaikan sehingga, ketika Undang-undang Perlindungan dari Infeksi berlaku, jumlah yang diterima sama besarnya dengan upah bersih pekerja selama enam minggu pertama, dan sama dengan tunjangan cuti sakit.²⁰

Di **Italia**, di bawah stimulus Cura Italia, persyaratan untuk memperoleh tunjangan pengangguran bagi para pekerja pertanian telah dipermudah dan pembayaran satu kali sebesar 600 EUR telah diberikan kepada pekerja rentan. Pekerja yang berpenghasilan lebih rendah dari 40,000 EUR setahun yang harus hadir di tempat kerja berhak atas tunjangan satu kali bebas pajak sebesar 100 EUR.

Di **Namibia**, Paket Stimulus dan Bantuan Ekonomi sebesar 200 juta dolar Namibia (NAD) mencakup jaminan pinjaman dengan bunga rendah bagi petani dan usaha-usaha pertanian, termasuk petani yang mengalami kendala kas dan UKM pertanian yang mengalami kehilangan pendapatan. Sebuah Bantuan Penghasilan Darurat satu kali sebesar 750 NAD akan disediakan bagi semua pekerja formal dan informal yang kehilangan pekerjaan mereka.

Di **Filipina**, paket fiskal sebesar 27,1 milyar peso Filipina (PHP) mencakup perlindungan sosial bagi para pekerja yang paling rentan dan dukungan bagi sektor-sektor yang terkena dampak paling parah, seperti pariwisata dan pertanian. Di bawah program Subsidi Darurat, 18 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yang bekerja dalam sektor informal akan diberikan 5,000 hingga 8,000 PHP per bulan selama dua bulan. Administrasi Kesejahteraan Pekerja di Luar Negeri juga menyediakan bantuan tunai kepada pekerja Filipina di luar negeri yang terkena pelarangan perjalanan.²¹

▶ 3. Perangkat dan respons ILO

ILO telah mengadopsi serangkaian instrumen dan perangkat yang menyediakan sebuah kerangka yang berharga bagi langkah-langkah tanggap darurat dan pembangunan sektor berjangka lebih panjang secara berkelanjutan.

Konvensi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan (Pertanian) Convention, 1969 (No. 129), bersama dengan instrumen-instrumen relevan lainnya, menjabarkan serangkaian prinsip-prinsip untuk membangun dan menyelenggarakan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang berfungsi, termasuk rekrutmen dan kekuasaan serta kewajiban para pengawas ketenagakerjaan.

Konvensi mengenai Hak untuk Berserikat (Pertanian), 1921 (No. 11) memastikan semua yang

terlibat dalam pertanian memiliki hak yang berserikat dan bergabung, seperti halnya pekerja-pekerja industri.

Konvensi mengenai Perkebunan, 1958 (No. 110), menjabarkan serangkaian prinsip-prinsip pelibatan dan rekrutmen pekerja migran, kontrak kerja dan penghapusan sanksi pidana, upah, libur tahunan dengan upah dibayar, istirahat mingguan, tunjangan kehamilan, kompensasi pekerja, hak kebebasan berserikat, dan perundingan bersama, pengawasan ketenagakerjaan, perumahan dan perawatan kesehatan. Rekomendasi mengenai Perkebunan, 1958 (No. 110), memuat panduan secara rinci untuk memperbaiki kondisi kerja dari pekerja perkebunan.

Konvensi mengenai Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141), dan Rekomendasi penyertanya No. 149,

18 ILO, "Governments' responses to COVID-19 (Countries A-L)", 6 April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

19 Fiji Village, "Agriculture response package for COVID-19 will be implemented to ensure access to food is not affected - Reddy", 19 Maret 2020; The Fijian Government, "2020 COVID-19 budget response address by the Attorney-General and Minister for Economy Hon. Aiyaz Sayed-Kaiyum", 27 Maret 2020.

20 Euractiv, "German farms need nearly 300,000 seasonal farm workers", 25 Maret 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

21 The Diplomat, "COVID-19: Countering the economic contagion", 24 Maret 2020; International Monetary Fund, "Policy Responses to COVID-19", April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

menyediakan hak pekerja pertanian dan pedesaan untuk membentuk dan bergabung dalam semua tipe organisasi pekerja pedesaan, sesuai dengan pilihan mereka, guna memiliki suara yang kuat, independen dan efektif.

Konvensi mengenai Keselamatan dan Kesehatan dalam Pertanian, 2001 (No. 184), dan Rekomendasi No. 192 penyertainya, menjabarkan serangkaian prinsip-prinsip untuk menyusun dan menerapkan sebuah kebijakan nasional yang koheren mengenai keselamatan dan kesehatan dalam sektor pertanian.

Rekomendasi mengenai Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202), mempromosikan pendekatan yang bersifat universal dan progresif untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua, yang khususnya relevan dalam sektor pertanian dan perekonomian pedesaan. Rekomendasi ini mendorong perluasan perlindungan sosial dengan menjamin akses ke layanan kesehatan dasar dan jaminan penghasilan pokok sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan secara nasional, termasuk rumah tangga miskin yang rawan pangan dan pekerja dalam sektor informal, yang khususnya marak di pertanian dan sektor terkait.

Rekomendasi mengenai Ketenagakerjaan dan Kerja yang Layak untuk Perdamaian dan Ketangguhan, 2017 (No. 205), menekankan bahwa respons terhadap krisis perlu memastikan dijunjungnya semua hak asasi manusia dan aturan hukum, termasuk prinsip-prinsip mendasar dan hak-hak di tempat kerja dan untuk standar ketenagakerjaan internasional.

Kaidah mengenai keselamatan dan kesehatan di pertanian (2011) menyediakan pedoman mengenai penerapan Konvensi-konvensi ILO yang relevan, termasuk strategi-strategi yang tepat untuk menanggapi serangkaian risiko K3 yang dihadapi dalam pertanian.

Memberikan suara bagi para pekerja pedesaan: Survei Umum mengenai hak berserikat dan instrumen organisasi pekerja pedesaan, Laporan III (Bagian 1B), Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-104, Jenewa (2015).

Standar ILO dan COVID-19: Pertanyaan yang sering diajukan – Ketentuan-ketentuan utama dari standar ketenagakerjaan internasional yang relevan dengan wabah COVID-19 yang terus berkembang.

Portofolio catatan pedoman kebijakan mengenai promosi pekerjaan yang layak dalam perekonomian pedesaan (ILO, 2019) menawarkan pedoman bagi para pembuat kebijakan, mitra sosial dan praktisi pembangunan mengenai cara-cara yang efektif dalam menangani persoalan-persoalan ketenagakerjaan - dan terkait dengan pekerja - dalam konteks pedesaan. Dokumen ini menyediakan contoh-contoh konkret program kegiatan ILO untuk perekonomian pedesaan dan menyatukan serangkaian instrumen dan perangkat yang telah dikembangkan selama tahun-tahun terakhir.

Pekerjaan yang layak di perkebunan (ILO, 2017) merupakan sebuah program ILO yang bertujuan meningkatkan akses pekerja pertanian terhadap hak-haknya dan pekerjaan berkualitas, sementara mendukung usaha untuk menerapkan standar ketenagakerjaan pokok dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ketenagakerjaan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan daya saing dalam rantai pasokan mereka. Program ini mencapai hal tersebut dengan mendukung dialog sosial, memperkuat peraturan tenaga kerja dan penegakan peraturan hukum nasional serta meningkatkan produktivitas dan keterampilan.

Informasi kontak:

International Labour Organization
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 – Switzerland

Departemen Kebijakan Sektor
E: sector@ilo.org